

EKSISTENSI LEMBAGA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MENCEGAH KEPAILITAN PADA PENGADILAN NIAGA

Zuherna

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menginventarisasi latar belakang para pengusaha memilih lembaga penundaan kewajiban utang sebagai alternatif penyelesaian utang di samping proses kepailitan dan untuk mengetahui keefektifan lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam pencegahan kepailitan pada Pengadilan Niaga di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dikemukakan bahwa dalam kerangka teoritis tiga elemen atau aspek dari sistem hukum, yaitu: *structure*, *substance* dan *legal culture*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa bahwa lembaga PKPU merupakan sarana yang strategis dalam mencegah kepailitan. Sehingga apabila permohonan PKPU dikabulkan secara tetap dan tercapai perdamaian, maka perusahaan (debitor) akan terhindar dari kepailitan dan tetap mendapat melanjutkan kegiatannya. Keadaan seperti ini secara ekonomi sangat menguntungkan, hal ini disebabkan karena debitor melanjutkan usahanya, tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja, tidak terganggunya rantai usaha, seperti pemasok (supplier) dan pelanggan. Kreditor akan dapat dibayar seluruh utang-utangnya oleh debitor. Selain itu perusahaan tetap akan memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional baik melalui pembayaran pajak, sebagai tempat lapangan kerja maupun kedudukannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. sesungguhnya PKPU ini merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor kunkuren. Berbeda dengan kepailitan, karena walaupun dalam proses kepailitan juga ada kemungkinan tercapainya perdamaian, pada dasarnya kepailitan ditujukan kepada pemberesan harta pailit dengan para kreditor yang pada umumnya dengan cara menjual semua bedel pailit dan membagikan kepada para kreditor yang berhak menurut urutan dalam undang-undang.

Kata Kunci : pencegahan kepailitan

EXISTENCE OF INSTITUTION DELAY DEBT OBLIGATIONS (PKPU) PREVENT THE BANKRUPTCY COURT OF COMMERCE

Zuherna

Abstract

This research was conducted to understand and inventory the background of the entrepreneur chooses delays institution debt obligations as an alternative to debt settlement beside the bankruptcy process and to determine the effectiveness of institutions Suspension of Payment (PKPU) in the prevention of bankruptcy in the Commercial Court in Indonesia. The theory used in this research is the theory of the legal system put forward by Lawrence M. Friedman argued that the theoretical framework of the three elements or aspects of the legal system. namely: structure, substance and legal culture. The method used is a normative legal research is descriptive analysis, by describing the legislation in force and associated with legal theories into practice its implementation, which berkaitan with implementation with regard to the issues to be studied. The results of this study found that the agency PKPU formulated a strategic tool in preventing bankruptcy. So that if the petition is granted permanently PKPU and peace is achieved, then the company (debtor) will avoid bankruptcy and still get to continue its activities. Such a situation is economically very profitable, it is because the debtor to continue his efforts, no occurrence of a termination, no disruption of the chain, such as suppliers (suppliers) and customers. Creditors will be paid throughout the debts by the debtor. In addition the company will still be giving out the contribution to the national development through tax payments, as a place of employment as well as its position as a driver of economic growth. PKPU actually a provision of opportunity for debtors to restructure its debts, which may include payment of all or part of the debt owed to creditors kunkuren. In contrast to bankruptcy, because although in bankruptcy proceedings there is also the possibility of achieving peace, basically addressed to the bankruptcy settlement with the bankruptcy estate of the creditors in general by means of selling all Bedel bankruptcy and distributed to creditors who are entitled according to the order in the legislation.

Keywords: prevention of bankruptcy